

## Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

### Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

#### A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas</b>					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5	N/A	N/A*	N/A*
II	<b>Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing</b>					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30 %	2,43%	2,52%	103,98%
III	<b>Sasaran Program 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Efektif</b>	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	2 dari 4 KSEP	2 dari 4 KSEP	100%
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing					
3.2	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	41%	25%	60,97%
IV	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata</b>					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	6,40%	6,40%	100%
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.314	USD 1.314	100%

<b>V</b>	<b>Sasaran Program 5 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas</b>	Indeks	3 dari 4	3	4	133%
<b>5.1</b>	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata					
<b>VI</b>	<b>Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas</b>	Indeks	3 dari 4	3	3	100%
<b>6.1</b>	<i>Indikator 6.1</i> Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata					
<b>VII</b>	<b>Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas</b>	Percentase	85%	40%	40%	100%
<b>7.1</b>	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata					

\*Data BPS belum tersedia

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan PAriwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	<b>Sasaran Program 1:</b>  <b>Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas</b>
---	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan**

**Latar Belakang**

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk

mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara Industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan target peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50% dan (ii) Tahun 2029: 8,14%. Untuk menetapkan target kontribusi tahunan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan forecasting (peramalan) menggunakan deret waktu (time series) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target kontribusi industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun tersebut sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%; (ii) Tahun 2027: 6,85%; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%.

Kontribusi industri pengolahan dibagi menjadi dua yaitu industri AKFT dan ILMATEA. Kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan kontribusi ILMATEA meliputi 6 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (ii) Industri Logam Dasar; (iii) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; (iv) Industri Mesin dan Perlengkapan; (v) Industri Alat Angkutan; dan (vi) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan tahun 2025 adalah sebesar **5,5%**.

Pengukuran Peningkatan Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Pengolahan melalui formula:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(NTB \text{ Industri Pengolahan } t - NTB \text{ Industri Pengolahan } t-1)}{NTB \text{ Industri Pengolahan } t-1}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 5,5%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	N/A*	N/A*

\*Data BPS belum tersedia

Persentase realisasi peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB triwulan II tahun 2025 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan II tahun 2025 sehingga realisasi pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diperoleh.

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemetaan isu dan permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan ; <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Pembahasan Perkembangan Negosiasi Pengenaan Tarif As kepada Indonesia pada tanggal 30 April</li></ul>

			<p>2025 untuk melengkapi penyusunan bahan perundingan agar memberikan dampak signifikan dalam memperluas pasar ekspor, memperkuat daya saing industri dalam negeri, dan mempercepat penyelesaian Keppres Satgas terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Deregulasi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional pada tanggal 21 April 2025, akan dilakukan reviu terhadap hasil pemetaan pos tarif HS yang berpotensi dilakukan pengurangan lartas oleh Kemendag dan Kemenko Perekonomian yang meliputi 3 (tiga) kelompok barang yaitu (i) 2110 HS berdasarkan stranas PK; (ii) 486 HS berdasarkan kriteria Kemendag; (iii) 329 HS berdasarkan kriteria bahan baku</li> <li>● Rapat Koordinasi Terbatas pembahasan Revisi Peraturan menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada tanggal 6 Mei 2025, terkait Pertek dan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) yang diatur dalam Permen di K/L teknis agar segera disesuaikan sehingga dapat</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>selesai bersamaan dengan revisi Permendag dimaksud sesuai target yang ditetapkan. Kementerian mengusulkan komoditas <i>frozen meat</i> untuk dibahas pada revisi tahap selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri berdasarkan surat keluhan IRGMA (Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPBG). Telah diterbitkan perubahan kedua atas keputusan Menteri ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Selain itu, disampaikan pemenuhan kebutuhan pasokan gas untuk wilayah Indonesia bagian Barat akan dilakukan penjajakan dengan banyak investor (Rostneff asal Rusia untuk pembangunan kilang di Tuban dan ExxonMobile asal AS untuk CCS/CCuS).</li> <li>• Rapat Koordinasi Pembahasan Industri Halal pada tanggal 21 April 2025, Asdep ILMATEA kemenko Perekonomian menginisiasi untuk menjadi <i>lead collaborator</i> sementara yang berkomitmen dalam menangani industri halal dan akan</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>berkoordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait khususnya BPJPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Deregulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam PP 5 Tahun 2021 pada tanggal 8 April 2025 dengan kesimpulan bahwa terkait penyesuaian atau relaksasi TKDN agar tetap dilanjutkan namun hanya penyesuaian redaksional bukan substansial.</li> <li>• Diskusi Kebijakan dan Implementasi TKDN bersama Kepala Pusat P3DN Kemenperin pada tanggal 10 April 2025, terkait arahan Presiden untuk menghapus Pertek akan ditindaklanjuti oleh Menperin termasuk jumlah Pertek <i>existing</i> dengan melaporkannya kepada Presiden melalui Setneg pada tanggal 11 April.</li> </ul>
2	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan Industri pengolahan khususnya non-migas	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis terkait antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pertemuan Bapak Menko Perekonomian dengan Asosiasi Industri Padat Karya pada tanggal 30 April 2025. Para pelaku usaha melaporkan kinerja ekspor belum mengalami penurunan signifikan setelah</li> </ul>

			<p>pemberlakuan kebijakan tarif Trump. Para Pelaku industri padat karya diharapkan dapat memanfaatkan insentif pemerintah pada jangka pendek seperti Kredit Investasi Padat Karya untuk mengurangi beban operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapat Koordinasi Teknis Terkait Permohonan HIPPINDO agar Sektor Ritel Masuk dalam Industri Padat Karya pada tanggal 16 April 2025. Berdasarkan Permenperin 51/2013 sektor ritel belum memenuhi kriteria sebagai industri padat karya. Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag dapat melakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi sektor ritel sebagai sektor padat karya dalam konteks ekosistemnya.</li> <li>● Rapat Pengharmonisasi atas RPermenperin tentang Verifikasi Penelusuran Teknis Bidang Standardisasi Industri pada tanggal 23, 26 dan 28 Mei 2025. Draf RPM Bidang Standardisasi</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Industri dimaksud yang sudah dilakukan perbaikan oleh Kemenperin, akan disampaikan ke Kemenkumham untuk diproses lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembahasan Arah Kebijakan, Strategi Prioritas dan Isu-isu terkait Pengembangan Industri yang relevan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2029 pada tanggal 3 Juni 2025. Perlu menyusun program-program strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional terkait Pengembangan Industri dan Hilirisasi untuk disusun ke dalam Renja K/L TA 2026.</li> </ul>
3	Melakukan pembahasan kendala Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Terlaksana	<p>a. Telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Ekosistem Industri Baterai KBLBB di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2025, dalam rangka pemetaan kajian dan regulasi terkait ekosistem baterai EV yang disusun oleh Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian</p>

			Perindustrian, dan IBC serta teridentifikasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan peta jalan komprehensif.FGD menghasilkan dukungan K/L terkait terhadap penyusunan roadmap atau peta jalan nasional untuk memperkuat pengembangan ekosistem industri baterai secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk mendukung ekosistem KBLBB.
4	Pembahasan kendala/permasalahan dalam Penyelesaian Regulasi untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Terlaksana	<p>a. Telah dilaksanakan rapat pembahasan draft Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 21 April 2025 dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian.</p> <p>b. Telah disahkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 374 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 5 Mei 2025.</p>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Persiapan dan Pertemuan *Walk-Through Text* Persetujuan Perdagangan Resiprokal RI-AS pada tanggal 9 Mei 2025 (Persiapan) dan 12-14 Mei 2025 (Pertemuan). Indonesia siap mengurangi tarif pada beberapa sektor prioritas seperti minuman beralkohol, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), baja, elektronik, seluler, dan alat kesehatan. Namun, USTR menyampaikan bahwa terkait informasi tentang kriteria pengurangan tarif resiprokal AS merupakan keputusan final dari Presiden Trump yang didasarkan pada analisis kumulatif dari totalitas komitmen Indonesia mencakup hambatan tarif, non tarif dan penegakan hukum.
2. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Isu Keamanan Nasional dan Ekonomi Dalam Perundingan Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS pada tanggal 19 Mei 2025. Secara umum apabila semua usulan Amerika Serikat disetujui maka kedaulatan Indonesia akan tergerus, sehingga dalam menanggapi poin-poin usulan Amerika Serikat perlu mempertimbangkan bahwa Indonesia: mengikuti sistem multilateral, sebagai negara berkembang yang perlu melindungi kondisi dalam negeri, dan basis kebijakan bebas aktif sehingga tidak membatasi pihak manapun.
3. Kegiatan Seminar Nasional Kesiapan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional menuju Standar Wajib Industri Hijau dan Tekstil Halal pada tanggal 16 April 2025. Diperlukan langkah strategis guna mendorong pertumbuhan industri TPT baik dari sisi kebijakan, pengawasan maupun penguatan interkoneksi dengan beberapa negara.
4. Rapat Partisipasi sebagai Delegasi RI pada Lanjutan Finalisasi *Draft Protocol* Pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia pada tanggal 21 dan 24 Maret 2025. Kedua pihak sepakat bahwa pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia akan diadakan di Indonesia pada tahun 2026. Akan disetujui bersama melalui nota diplomatik dalam dua naskah asli dalam bahasa inggris.
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Latar Belakang dan Kronologis Kerjasama Pelatihan IKM dengan Kementerian Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) Republik Federal Jerman pada tanggal 28 Mei 2025. Terjadi perubahan nomenklatur BMWK menjadi Kementerian EKonomi dan Energi Jerman (BMWE). Rapat koordinasi lanjutan akan diselenggarakan untuk membahas penunjukan *Implementing Agency* program pelatihan IKM bersama Kementerian perindustrian, KBRI Berlin dan KADIN Indonesia.
6. *Workshop The New Industrial Policy Landscape of East and Southeast Asia: Regional Lunch for East and Southeast Asia of UNIDO Industrial Development Report 2024*. Industrialisasi modern memerlukan investasi keterampilan, teknologi, upaya terkoordinasi, dan kebijakan yang dirancang dengan cermat. Pemerintah perlu mendorong ketercapaian SDG's di berbagai bidang dan Kemenko Perekonomian dapat mengambil peran sesuai tusinya.
7. *Workshop Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2025* pada tanggal 11 Juni 2025. Meskipun terdapat berbagai risiko global dan domestik, seperti perang dagang, ketegangan geopolitik, inflasi akibat tarif impor, likuiditas ketat, serta pemangkasan anggaran, perekonomian Indonesia masih memiliki katalis positif. Sektor-sektor potensial seperti telekomunikasi, kesehatan, hilirisasi industri, F&B, utilitas industri dan sektor pemerintah diperkirakan tetap akan tumbuh.

8. Penyampaian Masukan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Labour Rights Advisory Board* (IPEF LRAB) Sector-Specific Report pada tanggal 26 Mei 2025 dengan mengusulkan sektor potensial Indonesia yaitu Manufaktur (Tekstil dan Alas Kaki) dan Budidaya Kelapa Sawit beserta pertimbangan pro dan kontra pada beberapa aspek krusial.
9. Pengembangan Industri baterai KBLBB masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) Perlunya peningkatan iklim investasi untuk mensukseskan program hilirisasi mineral sebagai bahan baku baterai; (2) Belum tersedianya kerangka pemanfaatan mineral untuk industri baterai (keterbatasan smelter dan teknologi untuk memproduksi nikel berkualitas tinggi sesuai standar penggunaan baterai); (3) Belum tersedianya standarisasi baterai untuk KBLBB.
10. Tindak lanjut dari surat Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan bahwa rapat dan koordinasi Tim Koordinasi Program Percepatan KBLBB untuk Transportasi Jalan tetap dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi walaupun telah terdapat perubahan kabinet pemerintahan, memerlukan pembahasan lebih lanjut mengingat koordinasi di tingkat teknis (Eselon I dan Eselon II) sesuai Perpres 55/2019 Jo Perpres 79/2023 masih mengacu kepada Permenko Marvest yang saat ini sudah tidak berlaku.
11. Output dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 374 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan karena tidak tersedianya anggaran. Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kebijakan, rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, hingga harmonisasi membutuhkan anggaran, namun saat ini belum tersedia, sehingga berpotensi menghambat proses implementasinya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
4. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

## 2

### Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Laju Pertumbuhan  
PDB per tenaga  
kerja**

**Latar Belakang**

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja

Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih dibawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3,30% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan II sebesar 2,43%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang telah terealisasi sebesar 2,52% atau mencapai 103,98% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2,43% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja Pengolahan	Persentase	2,43%	2,52%*	103,98 % (Memuaskan)

\*BPS (diolah)

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	<p>Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, telah dilaksanakan koordinasi bersama dengan Kemenko PMK dan Kemen PPPA untuk menjadi bagian dalam Pokja Care Economy.</li> <li>• Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja, telah diterbitkan sejumlah aturan turunan yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri</li> </ol> </li> </ul>

			<p>Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.</p> <p>c. PMK Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Awal Dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti kebijakan paket stimulus ekonomi kuartal II-2025, telah dilaksanakan rapat teknis dalam rangka pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.</li> </ul>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Selaku Ketua

Pelaksana Tim Transisi Pengalihan Program Kartu Prakerja dari Kemenko Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025. Keputusan Deputi ini dalam rangka mendukung penyusunan revisi RPerpres Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi *teleconference* seperti Zoom.
2. Telah dibuat tempat penyimpanan file berbasis *cloud* yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga meningkatkan kinerja.
3. Pengelolaan tata persuratan telah dilaksanakan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja dan memberikan dampak pada efisiensi anggaran karena dinilai mengurangi belanja ATK.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Full launch pelaksanaan Program Tech:X belum dapat dilaksanakan dan masih dalam tahap persiapan dikarenakan perbedaan sudut pandang konsep implementasi program dari Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia mulai dari mekanisme monitoring data, konsep full launch, dan publikasi job order secara open market. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tantangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Implementasi Pilot Project Tech:X akan didorong dalam Diskusi Working Group Ketenagakerjaan dalam Ministerial Meeting 15th pada bulan Juni 2025.

**3**

#### **Sasaran Program 3:**

**Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing</b>	<b>Latar Belakang</b>
	<p>Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan unggulan yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Penguatan daya saing dilakukan melalui integrasi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.</p>

KSE yang menjadi target merupakan KI, KEK, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 KSE Prioritas yang menjadi target dari 12 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Data yang digunakan bersumber dari antara lain:

1. Progres pelaksanaan KSE berdasarkan dengan data monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM;
3. Data Investasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Pengusahaan BBK dan/atau Dewan Kawasan BBK, dll); dan/atau
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kawasan Ekonomi dari Badan Usaha Pengelola.

Tercapainya target atas Indikator "Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing" didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;

6. Laporan kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional.

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 4 KSEP penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 Adapun target triwulan sebesar 2 KSEP dari 4 KSEP.

Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing didasarkan pada jumlah realisasi Kawasan Strategis ekonomi sebanyak 4 (empat) Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan secara konsisten melalui realisasi investasi secara kontinyu dalam pembangunannya.
2. Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.
3. Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
4. Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam kawasan.

Dalam hal, KSE yang ditargetkan belum memenuhi 4 kriteria yang ditentukan maka belum mencapai target yang ditentukan.

Hasil IKU ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Total\ KSEP = \sum Jumlah\ KSEP\ yang\ telah\ memenuhi\ kriteria\ dan\ beroperasi$$

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing yang telah terealisasi sebesar 2 KSEP atau mencapai 50% dari target Tahun 2025 sebesar 4 KSEP dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	KSEP	4 dari 4 KSEP	2 dari 4 KSEP	50%

Jumlah KSEP pada triwulan II didapatkan dari jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi pada triwulan II tahun 2025. Penyelesaian Jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang dicapai dalam target triwulan II tahun 2025 ini adalah jumlah KSEP yang telah selesai yaitu pengembangan Kawasan Industri Batang

dan Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan II, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas, antara lain:

1. Koordinasi dan monitoring dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan di kawasan strategis.
2. Koordinasi terkait alokasi dan penyerapan anggaran pengadaan tanah bersama LMAN guna mendukung kelancaran pembangunan kawasan.
3. Koordinasi evaluasi proyek-proyek eksisting dan usulan baru yang berlokasi dalam kawasan prioritas, sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan ke depan.
4. Sosialisasi kepada pemerintah daerah guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap arah pengembangan kawasan strategis.
5. Diseminasi capaian pengembangan kawasan melalui media nasional sebagai bentuk transparansi dan upaya meningkatkan partisipasi publik.

IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ini merupakan suatu IKU baru di unit kerja sehingga masih belum terdapat perbandingan dengan pelaksanaan IKU sebelumnya. Namun, untuk pelaksanaan reaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target triwulan II tahun 2025 yang menjadi target.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi teknis terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 2 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilaksanakan Kunjungan atas Tindak Lanjut MOU PT KITB dengan CSCEC pada 17 April 2025</li><li>• Telah dilaksanakan Pertemuan terkait Rancangan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur dan Pembiayaan Iklim yang Baru pada 28 April 2025</li><li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Perluasan KEK Gresik pada 7 Mei 2025</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Konsep Memorandum of Understanding on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chains antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 8 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan KIAT Technical Committee Meeting untuk Infrastructure Funding and Financing Activity Stream pada 20 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 pada 3 Juni 2025</li> </ul>
2.	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 2 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Industri pada 25 April 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Kegiatan FGD Pedoman KEK Hijau pada 8 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada 9 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR pada 14 Mei 2025</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pembuktian Alas Hak dalam rangka Kawasan Hutan pada 15 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Ekspose Persiapan Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada 2 Juni 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RAPERMEN PNBP Pelepasan Kawasan Hutan pada 5 Juni 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 17 Juni 2025</li> </ul>
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan di 2 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada 22 April, 8 Mei dan 3 Juni 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Evaluasi Kawasan Industri RPJMN 2025-2029 dan PSN dalam RKP 2026 pada 23 Juni 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KEK Pariwisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 pada 25 Juni 2025</li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Keanggotaan Dewan Nasional KEK pada tanggal 8 Januari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) pada tanggal 17 Januari 2025.
- c. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dukungan Kementerian/Lembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 21 Januari 2025.
- d. Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Kawasan Industri ASPIRE Stargate oleh PT Stargate Mineral Asia di

Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Januari 2025.

- e. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tanggal 13 Februari 2025.
- f. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada 14 Februari 2025.
- g. Telah dilaksanakan Rapat Pengumpulan Informasi Awal atas Pengawasan Program Penguatan Investasi pada 18 Februari 2025.
- h. Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025.
- i. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Permohonan PKKPR di Kawasan KI IHIP pada tanggal 14 Maret 2025.
- j. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Lanjutan Persiapan Kunjungan Bapak Presiden RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tanggal 18 Maret 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut terdapat pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas;
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

### **Percentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri):  
Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi:  
Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
3. Sektor Bendungan:  
Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator "Penyelesaian Proyek Strategis Nasional" didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

## Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 83% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan II sebesar 41%.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2025 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi

proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2025:

1. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
2. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2025 sebanyak 12 proyek,

Formula perhitungannya =

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{\sum \text{proyek selesai}}{\sum \text{target proyek selesai}} + 100\%$$

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 30,12% dari target Tahun 2025 sebesar 83% dengan ringkasan sebagai berikut:

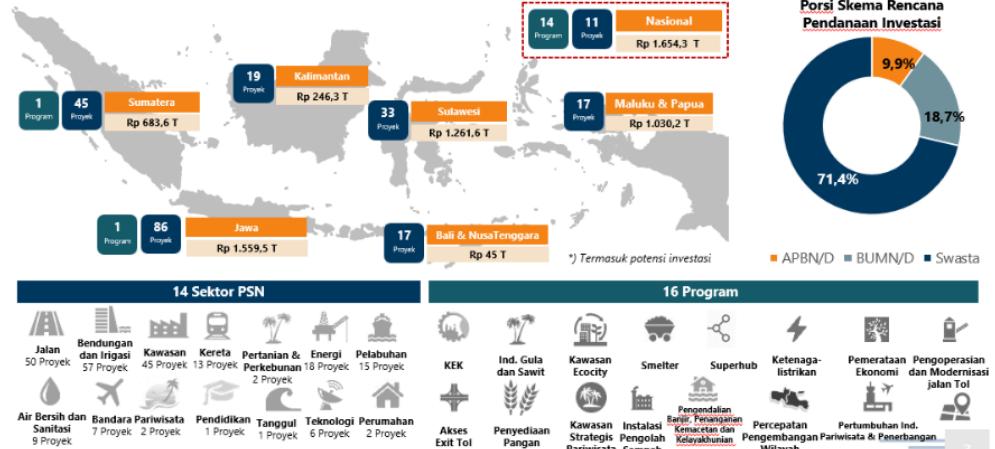
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	25%	30,12%

Persentase penyelesaian PSN pada triwulan II didapatkan dari penyelesaian pembangunan 3 dari 12 proyek pada triwulan II tahun 2025. Pembangunan 3 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 59,285 Triliun. Adapun 3 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga triwulan II tahun 2025 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor	Nilai Investasi
1.	Kawasan Industri Penebang	Kawasan	Rp 49,21 Triliun
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan	Rp 4,015 Triliun
3.	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Rp 6,06 Triliun

## Overview Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Permenko Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 228 Proyek dan 16 Program sebagai PSN dengan potensi nilai investasi (Capex) Rp 6.480,5 Triliun\*.



Berdasarkan daftar proyek dalam Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan Maret 2025, terdapat 228 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 6.480,5 Triliun. Dari total 228 proyek, terdapat 114 Proyek sudah selesai sepenuhnya pada Desember 2024, 12 proyek ditargetkan selesai pada tahun 2025, dan 102 proyek ditargetkan selesai di atas 2025. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 12 PSN agar dapat selesai di tahun 2025. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
SPAM Benteng Kobema	Air Bersih Dan Sanitasi
SPAM Wasusokas	Air Bersih Dan Sanitasi
Bendungan Meniting	Bendungan dan Irigasi
Jalan Tol Sigli Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Benoa	Pelabuhan
KI Kuala Tanjung	Kawasan
KI Bantaeng	Kawasan
KI Tanah Kuning	Kawasan
KI Kendari	Kawasan
KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan

KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
KI Pulau Penebang	Kawasan

Sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Realokasi Anggaran Pengadaan Tanah Melalui LMAN sektor Jalan Tol pada tanggal 11 April 2025</li> </ul>
2.	Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN KI Indonesia Huali Industry Park terkait pembahasan Debottleneck Pembangunan KI IHIP pada tanggal 24 April 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada tanggal 30 April 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan</li> </ul>

			<p>Pengesahan Hasil Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Aceh pada tanggal 4 Juni 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Indikasi Tumpang Tindih Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Juni 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Deliniasi Kawasan PSN pada tanggal 13 Juni 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pelepasan Kawasan Hutan pada PSN Industri Pengolahan Bauksit PT DSM pada tanggal 26 Juni 2025.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Diskusi HPT dengan PT PII pada tanggal 5 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Pipeline HPT pada tanggal 16 Mei 2025</li> </ul>
4.	Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan terkait skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden pada tanggal 5 Mei 2025</li> <li>• Telah dilaksanakan Kick off Meeting Permenko P3NK pada tanggal 2 Juni 2025</li> </ul>
5.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Belum Terlaksana	Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Kegiatan

			tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil revisi Peraturan Menteri Koordinator terkait daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
6.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan siaran Pers melalui website <a href="http://ekon.go.id">ekon.go.id</a> terkait evaluasi periodik capaian PSN, termasuk KIT Batang sebagai Bagian Proyek Two Countries Twin Parks (TCTP) pada tanggal 27 Mei 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyusunan revisi Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Menko masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait. Saat ini, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata juga tengah mengevaluasi baik usulan proyek baru maupun proyek yang sudah ada, termasuk mempertimbangkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN.
2. Revisi Peraturan Presiden terkait KPPIP masih berada dalam tahap persiapan administratif dan koordinasi antarlembaga, sebelum dapat diajukan secara resmi.
3. Terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan, khususnya terkait permasalahan pengadaan lahan yang masih berlangsung, seperti tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, lahan di kawasan hutan, serta tanah milik instansi. Permasalahan ini mencakup aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
4. Masih terdapat hambatan terkait kebutuhan tambahan anggaran atau pendanaan untuk sejumlah proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai upaya untuk menyelaraskan substansi kebijakan, menghimpun masukan teknis, serta memastikan adanya dukungan dan kesepahaman lintas instansi terhadap arah perubahan kebijakan yang sedang disusun.
2. Melaksanakan koordinasi lanjutan apabila terjadi hambatan (debottlenecking) dalam proses pembahasan. Bila muncul kendala atau perbedaan pandangan, maka akan dilakukan dialog ulang dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Diperlukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas permasalahan pengadaan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala.
4. Perlu disiapkan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian isu yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

## 4

### Sasaran Program 4:

#### Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pertumbuhan  
Sektor Akomodasi  
Makanan dan  
Minuman**

**Latar Belakang**

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif salah satunya sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan *share* atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%).

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu ( $t_1$ ) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya ( $t-1$ ). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun  $t_1$  dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun  $t-1$ . Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$[ (PDBakmm_{t_1} - PDBakmm_{t-1}) / PDBakmm_{t-1} ] \times 100\%$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 9,53% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 8,04% atau tercapai 84,36% dari target tahun 2025 sebesar 9,53% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tar get	Reali sasi	% Kinerja
IKU-4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,5 3%	8,04%	84,36% (Memuaskan)

Capaian kinerja triwulan II 2025 sebesar 8,04% didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan domestik pada triwulan II 2025 telah mencapai 331,37 juta kunjungan, meningkat 22,32% dari triwulan II 2024. Peningkatan kunjungan ini dipengaruhi oleh perubahan preferensi wisatawan untuk memilih alternatif liburan yang lebih terjangkau sehingga berdampak pada penurunan minat terhadap perjalanan ke luar negeri dan meningkatnya ketertarikan terhadap destinasi domestik.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1.	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan pertemuan dan audiensi dengan WIR Group yang dilaksanakan selama periode Mei-Juni.</li> </ul>
2.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dihimpun alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Digitalisasi Layanan Perizinan Event.</li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut

1. Mengikuti rakor perihal pengembangan pariwisata regeneratif pada 29 April 2025
2. Melakukan diskusi terkait pengembangan asuransi pariwisata dengan Insuretech dan Jasa Raharja Putera pada 2 Mei 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Dari rakor pariwisata regeneratif: diharapkan ada peningkatan daya tarik wisatawan jangka panjang karena wisata regeneratif menjadi tren global yang berpotensi meningkatkan lama tinggal wisatawan serta belanja pada akomodasi dan makan-minum. Serta memberikan legitimasi pada pelaku industri F&B lokal (kuliner tradisional, produk lokal) untuk terintegrasi dalam rantai nilai pariwisata berkelanjutan, sehingga kontribusinya ke PDB sektor akomodasi makan-minum semakin besar.
2. Pengembangan isu asuransi pariwisata diharapkan menjadi faktor pendukung meningkatnya minat wisatawan mancanegara dan domestik untuk melakukan perjalanan lebih sering dan lebih lama → berdampak pada meningkatnya konsumsi makan-minum dan akomodasi.

- Hingga 5 Juni 2025, sebanyak 21 event Karisma Event Nusantara (KEN) telah dilaksanakan di 18 Provinsi. Adapun 19 event telah dikaji dampaknya, yakni menarik kunjungan sebesar 1,73 juta pengunjung dan menghasilkan transaksi ekonomi sebesar Rp 159,94 miliar. Saat ini juga tengah dilakukan pembahasan mengenai transformasi ekosistem event melalui program digitalisasi perizinan event, termasuk membahas pembahasan standarisasi venue, SDM, serta pemanfaatan asuransi wisata dalam penyelenggaraan event .

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam pencapaian target Triwulan II Tahun 2025 adalah Penurunan Daya Saing di Pasar Regional (ASEAN). Terjadi penurunan daya saing pariwisata Indonesia di mata wisatawan regional Asia Tenggara yang ditunjukkan oleh penurunan kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut sebesar -3,76%, dengan penurunan terbesar dari Vietnam (-23,16%), pada saat negara-negara tetangga justru mencatatkan pertumbuhan wisata intra-ASEAN. Meskipun Indonesia mencatatkan pertumbuhan persentase kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di kawasan pada April 2025 (+9,1%) , secara volume absolut, jumlah kunjungan masih tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

Kondisi tersebut diperparah dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami inflasi hingga 1,87% secara Y-on-Y pada Juni 2025 di angka 111,03. Inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, termasuk diantaranya yang terbesar berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,99%), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,95%), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,23%).

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Upaya diplomasi dan kerja sama internasional menjadi langkah penting untuk memperluas pasar pariwisata Indonesia, antara lain melalui penandatanganan MoU dengan Tiongkok guna memperkuat promosi dan kunjungan wisatawan, serta implementasi *Joint Vision 2050* dengan Prancis yang menekankan penguatan konektivitas dan investasi. Indonesia juga aktif dalam pertemuan multilateral bersama Spanyol, India, Meksiko, dan Tunisia untuk bertukar praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di sisi promosi luar negeri, Indonesia memanfaatkan ajang bergengsi seperti World Osaka Expo 2025 dengan forum bisnis dan investasi, pertemuan B2B, serta *rolling exhibition* yang menyedot 107,11 ribu pengunjung, sekaligus menjajaki peluang pembentukan *Indonesian Centre for Cultural and Creative Economy* di Amerika Serikat yang akan menjadi pusat promosi film, kuliner, dan ekonomi kreatif. Sementara itu, di dalam negeri, penyelenggaraan *Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025* melalui 21 event di 18 provinsi berhasil menciptakan perputaran ekonomi Rp159,94 miliar, melibatkan 2,24 ribu UMKM, dan membuka 45,51 ribu lapangan kerja, sehingga menunjukkan kontribusi nyata event pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia di mata dunia.

**Pengeluaran  
Wisatawan  
Mancanegara  
(USD/Kunjungan)**

**Latar Belakang**

Angka capaian rata-rata spending wisman diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival (ASPA)* wisman dari data yang diperoleh dari BPS. Spending atau pengeluaran wisman adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisman antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata spending wisman terdapat dalam statistik pengeluaran wisman, yang dipublikasikan oleh BPS.

Data rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey (PES)* yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisman) menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas.

Adapun formula perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut

Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara= () Total Pengeluaran Wisman/Jumlah Wisman yang

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) yang telah terealisasi sebesar USD 1.199,71 atau mencapai 86,85 - 92,29% dari target Tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Mata Uang	USD 1.300 - 1.381, 3	USD 1.199,71	86,85 - 92,29% (Memuaskan)

Capaian rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada triwulan II 2025 yang mencapai USD 1.199,71 didukung oleh peningkatan daya saing

dan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara pada triwulan II 2025 yang mencapai 3,69 juta kunjungan, meningkat 13,96% dari triwulan II 2024. Pola pengeluaran wisman terbesar dialokasikan untuk akomodasi (37,48%), makan dan minum (19,53%), dan belanja cenderamata (11,17%).

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama K/L terkait dan beberapa perusahaan maskapai penerbangan ( <i>airlines</i> ) terkait peningkatan konektivitas melalui pembukaan rute dari dan menuju Bangka Belitung (Tanjung Kelayang).
2.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dihimpun alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pembahasan isu strategis pariwisata dengan Kementerian BUMN pada 16 Januari 2025
2. Mengikuti rapat kerja nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2024 pada 25 Januari 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Pemetaan isu strategis pariwisata dan *cross cutting issue* dengan Asdep BUMN Pariwisata Kemenko Perekonomian.
2. Mendapatkan evaluasi tahun 2024 mengenai KEK Tanjung Kelayang dan Morotai, untuk menetapkan strategi tindak lanjut peningkatan konektivitas dan aksesibilitas
3. Telah dikoordinasikan upaya peningkatan status Bandara HAS Hanandjoedin menjadi Bandara Internasional yang ditetapkan dalam regulasi KepMenHub No.26 Tahun 2025. Perubahan status ini diharapkan dapat meningkatkan traffic arus masuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, serta mengakselerasi peningkatan arus modal dan investasi di KEK Tj Kelayang dan Kab.Belitung pada umumnya Saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan Air Asia, Scoot, dan Citilink untuk pembukaan rute. Serta secara paralel sedang disiapkan beberapa event pariwisata di Belitung untuk tahun ini seperti Ambassador's Club Golf Tournament, dsb.
4. Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Pariwisata saat ini sedang menyusun revisi regulasi Badan Otorita Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo. Diharapkan perbaikan dapat meningkatkan tata kelola destinasi, kunjungan, serta mendorong akselerasi investasi. Pengajuan Izin Prakarsa RRPerpres RIDPN untuk 4 lokus (Labuan Bajo, BTS, Morotai, Wakatobi) ditargetkan pada bulan Juni 2025. Posisi saat ini sudah penyelesaian konsep draf RPerpres, dan telah dilaksanakan inventarisasi pemetaan indikasi program K/L & Pemda terkait. Dalam rangka mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada periode liburan sekolah dan summer holiday (juli-september), saat ini sedang disiapkan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pengunjung Candi Borobudur bersama dengan Kemenbud (BLU Museum Cagar Budaya), BRIN, dan PT TWC.
5. IQTF diharapkan dapat meningkatkan berbagai inisiatif pelaksanaan event berskala nasional maupun internasional, serta mengakselerasi penguatan ekosistem dan industri kepariwisataan secara berkesinambungan. Saat ini draft RPerpres IQTF sudah diselesaikan dan ditargetkan pengajuan Izin Prakarsa pada minggu ke-3/4 Juli 2025 setelah pelaksanaan Rapat Tingkat Menteri.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi

tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Hingga Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utamanya adalah ketidakpastian perekonomian global yang kurang kondusif sehingga menyebabkan penurunan daya beli wisatawan mancanegara. Ketidakpastian tersebut berasal dari berbagai kebijakan negara besar yang berdampak global sekaligus kebijakan transisi pemerintahan baru di beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu. Dinamika perekonomian global juga berdampak pada rendahnya kunjungan dari wilayah perbatasan. Secara kumulatif, kunjungan wisatawan dari wilayah perbatasan, seperti Malaysia, tercatat turun -15,96% sepanjang periode Januari - April 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelesaian permasalahan ekosistem pariwisata. Dengan membangun ekosistem yang lebih tangguh, mulai dari promosi yang tepat sasaran, peningkatan kualitas dan variasi produk wisata, hingga perbaikan konektivitas lintas batas, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada daya beli pasar tertentu yang sedang melemah. Promosi yang terintegrasi dan berbasis digital mampu memperluas jangkauan pasar baru, sementara diversifikasi produk wisata memberi pilihan yang lebih sesuai dengan preferensi wisatawan, termasuk wisatawan perbatasan yang sensitif terhadap harga. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur dan regulasi pendukung konektivitas lintas batas akan menurunkan biaya perjalanan, sehingga menjaga daya tarik Indonesia meski kondisi global kurang kondusif.
2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. Dengan memperluas jaringan penerbangan langsung, meningkatkan kualitas transportasi darat dan laut lintas batas, serta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang destinasi, wisatawan dapat menekan biaya dan waktu perjalanan sehingga kunjungan tetap menarik meskipun kondisi ekonomi global kurang kondusif. Upaya ini sekaligus memperkuat daya saing destinasi Indonesia di kawasan perbatasan seperti Malaysia, karena akses yang mudah dan cepat dapat menjadi insentif utama bagi wisatawan dengan daya beli terbatas untuk tetap melakukan perjalanan.

3. Perbaikan tata kelola destinasi pariwisata. Dengan tata kelola yang lebih profesional dan terintegrasi, destinasi dapat menawarkan pengalaman yang konsisten, aman, dan bernilai tambah sehingga wisatawan mancanegara tetap tertarik berkunjung meski daya beli mereka menurun. Tata kelola yang baik juga memungkinkan pengelolaan harga, kualitas layanan, serta diversifikasi produk wisata menjadi lebih adaptif terhadap kondisi global. Bagi wisatawan perbatasan, tata kelola yang lebih efisien dapat menghadirkan kemudahan akses, fasilitas lintas batas yang lebih ramah, serta paket kunjungan singkat dengan biaya terjangkau, sehingga mampu menekan penurunan kunjungan seperti yang terjadi dari Malaysia. Selain itu, tata kelola destinasi yang kuat membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha lokal untuk memperkuat promosi, meningkatkan konektivitas, dan menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih tangguh menghadapi dinamika global.

## 5

### Sasaran Program 5:

#### Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

#### Latar Belakang

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
5. Pengembangan Pariwisata

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

#### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

#### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks	efektivitas	SKP
= $\sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$		

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target triwulan II ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar nilai indeks \_\_\_ atau mencapai \_\_\_ dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	4	133%

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada triwulan II 2025, setiap Asisten Deputi telah melakukan proses KSP secara efektif yang dibuktikan dengan nilai efektivitas sebesar 100. Adapun isu strategis terkait pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 120,78. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputian adalah sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Realisasi TW II
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	112,50
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	119,30

3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	111,80
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	120,78
5.	Pengembangan Pariwisata	100,00

$$\text{Indeks KSP Deputi} = \sqrt[5]{112,50 \times 119,30 \times 111,80 \times 120,78 \times 100} = 112,63$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 112,63 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Rencana Tindak Lanjut PT Biofarma Group pada tanggal 11 Juni 2025</li> <li>• Rakor Pembahasan Sinkronisasi Data Impor TPT dan Alas Kaki Impor Ilegal pada tanggal 24 Juni 2025</li> <li>• Konsultasi Ahli/ Think-Tank dengan Prospera terkait Kajian Ekosistem TPT sejak tanggal 11 Feb 2025 - sekarang</li> </ul>

2.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapat Teknis Pembahasan Penyusunan Regulasi Perpanjangan Penyesuaian Iuran JKK untuk industri padat karya pada tanggal 26 dan 27 Mei 2025</li> <li>● Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal PHI dan Jamsos tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Mei 2025</li> <li>● Rapat Koordinasi Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 pada tanggal 4 Juni 2025</li> </ul>
3.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Proyek Non PSN Flood Management in North Java Project (FMNJP) di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Mei 2025</li> <li>● Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang</li> </ul>

			<p>Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar pada tanggal 22 Mei 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan The Final JCC Meeting of JUTPI-3 pada tanggal 24 Juni 2025</li> </ul>
4.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Penyelesaian PSN	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembahasan Usulan PSN Untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah pada tanggal 28 Mei 2025</li> <li>• Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Transportasi pada tanggal 18 Juni 2025</li> <li>• Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) KI IHIP, KI IKIP dan KI IMIP pada tanggal 23 Juni 2025</li> </ul>
5.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan stakeholder terkait</li> </ul>
6.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan stakeholder terkait</li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan Solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode triwulan II.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyesuaian kembali pelaksanaan sistem kerja setelah adanya kebijakan buka blokir anggaran.
2. Belum optimalnya koordinasi lintas K/L atau pihak terkait atas tindak lanjut terhadap hasil kegiatan rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor penyelesaian isu strategis.
2. Penguatkan koordinasi lintas K/L atau pihak terkait atas tindak lanjut hasil kegiatan rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

**6**

#### **Sasaran Program 6:**

**Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

**Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	3 dari 4	3	100 % (Memuaskan)

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan

TW II			
1.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I	Terlaksana	Pelaksanaan survei telah dilakukan yaitu menyebarkan survei kepada <i>stakeholder</i> dan menyusun laporan dari hasil survei tersebut.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian masing-masing unit kerja juga memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.400.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan seperti melakukan monitoring langsung ke lapangan.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

7

#### Sasaran Program 7:

**Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

**Latar Belakang**

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan II sebesar 40%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 47,1% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU- 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persen	40%	40%	100%

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Kerja untuk Mendukung IKU Deputi	Terlaksana	Telah disusun SK Pokja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Serta Pembangunan Zona Integritas Pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.
2.	Dialog Kinerja Deputi	Terlaksana	Rapat Internal Deputi 5 pada tanggal 11 Juli 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan benchmarking dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan rapat di kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 86.710.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis Kedeputian.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Reorganisasi dan perubahan nomenklatur di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menuntut penyesuaian tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
2. Belum ditetapkannya Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dialog kinerja di berbagai tingkatan (Kedeputian, Keasdepan, Sekretariat Deputi) dengan melibatkan lintas unit kerja.

Jakarta, 14 Juli 2025

**Deputi Bidang Koordinasi Industri,  
Ketenagakerjaan dan Pariwisata**

**Rudy Salahuddin**